

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN
PPK-BLUD**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

²

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan untuk
menerapkan PPK-BLUD

Kepada :

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota³

.....

di

Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 19**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, **kinerja** keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; ⁴
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. ⁵

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

.....,20....⁶

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Pemohon,
Kepala SKPD/Unit Kerja
yang akan menerapkan PPK-BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota

² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

³ pilih salah satu.

⁴ pilih salah satu

⁵ diisi salah satu Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

⁶ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA